

tidak mau menyerahkan kekuasaannya begitu saja baik kepada sesama laki-laki terlebih lagi kepada perempuan.

Suatu konsep mengenai kekuasaan perempuan yang berbeda dengan kekuasaan laki-laki yang selama ini menjadi acuan semua pihak. Kekuasaan dalam konsep feminisme adalah kekuasaan yang penuh dilimpahi kasih sayang. Kekuasaan semacam ini tidak berpusat pada diri sendiri melainkan lebih diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu kekuasaan perempuan juga mencakup gagasan memberdayakan orang lain.

Perempuan dan politik sering digunakan slogan untuk kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik. Akan tetapi itu hanya sebagai sebatas slogan karena saat pemilu berakhir partai politik lupa akan janjinya. Kepentingan perempuan saat kampanye dijanjikan akan dijadikan sebagai agenda politik tidak pernah di realisasikan. Walaupun diajak namanya ditempatkan pada urutan bawah atau yang dikenal dengan nomer sepatu. Berbagai alasan dikemukakan oleh para pemimpin partai perihal penurunan keterwakilan perempuan di DPR. Pertama partai politik kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan. Persoalan mengadang tidak hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas calon. Alasan minimnya kader perempuan terkait dengan sistem pengaderan partai yang memang tidak memberi tempat, perhatian serta peluang pada perempuan. Kedua, partai politik mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, karena rendahnya kesadaran politik. Selain kendala-kendala tersebut perempuan juga terhambat karena modal. Karena untuk bisa

masuk ke lembaga-lembaga politik formal seseorang harus memiliki sumber daya ekonomi (modal).¹

Perempuan pada setiap tingkat sosial- politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pembuatan keputusan. Perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik secara kenyataan bahwa publik dan budaya sering bermusuhan. Perempuan dan politik sering mengalami pasang surut yang berakhir pada penyempurnaan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama dalam pengambilan keputusan dan menduduki posisi strategis sangat rendah, baik di bidang eksekutif, legislative yudikatif maupun lembaga lainnya.²

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sulit dibayangkan terutama pada Negara- Negara berkembang. Hal ini disebabkan telah dibentuk oleh budayanya masing- masing yang menekankan bahwa kedudukan atau peranan wanita berkisar dalam lingkungan keluarga. Sedangkan politik yang digambarkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaan. Akan tetapi kedudukan perempuan yang demikian ternyata tidak dapat dipertahankan karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedikit demi sedikit bermula dari dunia barat perempuan dapat menaikkan posisinya di berbagai bidang termasuk politik. Memang masih terdapat hambatan yang besar untuk menembus pandangan bahwa politik adalah hanya milik laki-laki, tetapi kini masyarakat

¹ Siti Musdah Mulia & Anik Farida. Perempuan dan politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2005. Hlm 17

² Karam Azza dkk. Perempuan di Parlemen. Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan. 1999. Hal 17

mulai menyadari bahwa baik di Timur maupun Barat perempuan dapat terjun dan terlibat dalam politik asalkan diberi kesempatan.

Sekarang ini hampir semua negara telah memberikan hak politiknya pada warga perempuannya. PBB telah berjasa besar bagi proses perkembangan kedudukan perempuan. Usaha PBB dalam memperbaiki kedudukan perempuan adalah membentuk badan The United Nations Committee on the Status of Women. Dalam sidangnya yang pertama pada tanggal 11 Desember 1948, PBB memperingati pada anggotanya agar membentuk undang-undang yang menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik sebenarnya bukan lagi merupakan hal yang baru, karena mereka telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan.³

A.1 Kebijakan kuota 30% untuk perempuan

Perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota dalam pembahasan RUU pemilu telah membuahkan hasil dengan dimaksudkannya kuota pencalonan perempuan minimal 30% dalam pasal 65 Undang-Undang No 12 tahun 2003 tentang pemilu. Akan tetapi belum ada sanksi apabila ada partai politik yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU. Upaya- upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi jumlah kandidat perempuan minimal 30% dan tercapainya jumlah keterwakilan perempuan yang signifikan dilembaga legislatif yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan sehingga semakin bertambah minat mereka untuk terjun di politik.

³ T. O. Ihromi. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1995. Hal 482

Kedua meyakinkan partai politik bahwa peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan publik sangat penting sehingga perlu meningkatkan rekrutmen calon perempuan dan menempatkan mereka dalam daftar calon tetap (DCT) partai politik. Ketiga meyakinkan masyarakat agar termasuk media massa agar mendukung keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif khususnya lembaga lembaga legislatif daerah. Untuk memperjuangkan memenuhi kuota 30% ini memang bukan hal yang mudah terutama jika menyadari bahwa budaya patriarki sudah sedemikian merasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi perlu dipikirkan juga sesungguhnya dibutuhkan bukan hanya sekadar memenuhi kuota tersebut melainkan bagaimana mempersiapkan landasan kerja yang dapat memfasilitasi perempuan untuk masuk ke arena politik sehingga yang dipersiapkan adalah kualitas. Dengan begitu di masa depan tidak lagi ditemukan wakil- wakil perempuan di parlemen yang menjadi hiasan belaka. Karena yang dibutuhkan bukan hanya perempuan dalam arti fisik jasmani melainkan perempuan yang memiliki komitmen pada upaya- upaya pemberdayaan perempuan dan perempuan yang dapat mengartikulasikan kepentingan strategi perempuan menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat dan Negara.⁴

⁴ Ibid hal 120

B. Konsep Pemberdayaan Perempuan di bidang politik

B.1 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan merupakan informasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda yakni keluarga, masyarakat, pasar dan Negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dengan kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam 2 sisi yaitu : Pertama menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah- langkah positif.⁵

B.2 Pemberdayaan Perempuan Melalui organisasi

Pembangunan nasional selama dasawarsa terakhir dalam bentuk modernisasi di berbagai sector, harus diakui telah memberikan manfaat yang besar terhadap upaya pemberdayaan perempuan. GBHN 1999 mengarahkan Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dengan dua penekanan. Pertama, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai

⁵ Zakiyah. Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita. Jurnal Pengkajian masalah sosial Keagamaan. XVII. 01 (Januari- Juni 2010) hal 44

persatuan dan kesatuan, serta perjuangan kaum perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan masyarakat.

Salah satu ikhtiar dan memberdayakan perempuan Indonesia melalui peningkatan peran organisasi perempuan adalah dengan melakukan pendampingan dan perjuangan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga keserasian dan keadilan gender dapat terwujud. Tugas untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tugas untuk menciptakan keserasian dan keadilan gender di masyarakat merupakan amanat kehidupan yang harus dilaksanakan bersama. Karena itu pelbagai pihak perlu melakukan kerjasama baik antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan organisasi wanita maupun antarorganisasi wanita.

Untuk merealisasikan misi pemberdayaan perempuan yang diperlukan adalah peningkatan kualitas hidup perempuan di pelbagai bidang strategis, penggalakan sosialisasi keserasian dan keadilan gender, penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, penegakan HAM bagi perempuan, kemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan.

Tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan diarahkan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan. Semua kita lakukan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Rendahnya peran perempuan pada tingkat pengambilan keputusan di eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga strategis lainnya menyebabkan kurang

terakomodasikannya aspirasi dan kepentingan perempuan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peran politik perempuan masih belum maksimal.

Pemberdayaan perempuan tidak saja menjadi amanah rakyat melalui GBHN 1999 tetapi juga merupakan amanah internasional dalam kerangka kerja Global Konferensi Dunia ke 4 tentang perempuan mewujudkan keserasian gender. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan perempuan harus menggunakan pendekatan dan strategi yang tepat. Pengaruh utama gender merupakan sebuah strategi untuk mencapai keserasian gender melalui kebijakan pembangunan masyarakat. *Gender Mainstreaming* merupakan suatu pendekatan untuk pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan pengalaman dan masalah perempuan dan laki-laki ke dalam rancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial masyarakat. Tujuan pengaruh utama gender mainstreaming adalah memastikan bahwa baik perempuan dan laki-laki dapat menikmati keuntungan yang sama agar ketidaksetaraan dapat dihentikan.

Media massa mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam proses pemberdayaan perempuan. Signifikansi peran terletak pada eksistensinya. Pertama sebagai media komunikasi dan sosialisasi gagasan baik melalui media cetak

maupun media elektronik. Karena perempuan sering mengikuti acara TV, mendengarkan siaran radio dan membaca Koran atau media lainnya.⁶

Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pada dasarnya mengandung prinsip persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan tanpa ada perbedaan dalam segala bidang. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pergeseran Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, dinyatakan bahwa tujuan untuk mencapai kedudukan setara (equal status) perempuan sebagai peserta, pengambil keputusan, dan penikmat di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan dinyatakan untuk memberdayakan (empower) perempuan dan laki-laki perlu kerjasama sebagai mitra sejajar dan memberi inspirasi kepada generasi baru kaum perempuan dan laki-laki untuk bekerja sama demi kesetaraan, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian.

Pendekatan pemberdayaan menekankan pada fakta bahwa perempuan mengalami penekanan yang berbeda menurut bangsa, kelas sosial sejarah penjajahan kolonial, dan kedudukannya dalam ekonomi internasional pada masa kini. Dengan demikian perempuan tetap harus pada tingkatan yang berbeda. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya bagi wanita untuk meningkatkan

⁶ Khofifah Indar Parawansa. Mengukur Paradigma Menembus Tradisi. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia. 2006. Hlm 43

keberadaannya dan mengartikan pemberdayaan bukan konteks mendominasi orang lain dengan makna apa yang diperoleh perempuan akan merupakan kehilangan bagi lelaki, melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kecakapan atau kemampuan perempuan untuk meningkatkan kemandirian (self reliance) dan kekuatan dalam dirinya.

B.3 Kemitraan Perempuan dan Laki-Laki Sejajar

Strategi pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki menggunakan pendekatan dua arah antara perempuan dan laki-laki, saling menghormati sebagai manusia (human being), saling mendengar, dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain. Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu sehingga menjadi manusia mandiri tetapi tetap berkepribadian. Secara normatif, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sejajar. Akan tetapi dalam kehidupan nyata seringkali terdapat apa yang biasa disebut dengan istilah “gender statification”, yang menempatkan status perempuan dalam tatanan hierarki pada posisi subordinat atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum pria. Tatanan hierarki ini ditandai oleh kesenjangan ekonomi (perbedaan akses pada peran politik).

Kaum laki-laki memperoleh akses yang lebih besar dari kaum perempuan dalam sumber-sumber ekonomi dan politik. Secara politis laki-laki lebih banyak menempati posisi- posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu perempuan untuk mencapai puncak strata sosial lebih berat dan berliku-liku. Konsep kesejajaran atau kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki mengandung

makna tidak ada pihak yang menguasai dan yang dikuasai, tidak ada yang mengeksploitasi dan dieksploitasi. Akan tetapi ini mengandung arti bahwa kaum perempuan dan laki-laki saling memberdayakan sehingga mengakibatkan adanya dialog dan komunikasi. Sebaliknya jika salah satu pihak mempunyai keinginan untuk menguasai pihak lain hubungan komunikasi ini dapat menimbulkan debat antar keduanya karena terdapat kecenderungan usaha untuk menang. Pada hakekatnya perempuan dan laki-laki saling membutuhkan dalam usaha mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dilakukan sendiri.

Kemitra sejajar perempuan dan laki-laki menjadi masalah bagi pasangan yang cukup terdidik. Kesadaran akan pentingnya dan keharusan kemitra sejajar antara suami istri merupakan aspirasi yang diasosiasikan dengan perempuan yang terdidik dan merasa mempunyai kemampuan untuk mengatur dan menguasai kehidupannya. Dengan demikian masalah kemitra sejajar lebih merupakan masalah keluarga golongan menengah ke atas.

Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki adalah kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan kedudukan peranaan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dan mengisi di semua bidang kehidupan. Perwujudan kemitra sejajar yang harmonis merupakan tanggungjawab bersama. Untuk mencapai kesetaraan laki-laki dan perempuan diperlukan transformasi nilai yang

berkenaan dengan perubahan hubungan jender dan keseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.⁷

C. Konsep Model Pemberdayaan Perempuan

Tipologi pengembangan masyarakat ada empat model pendekatan yaitu model pendekatan penyuluhan, pendekatan pelatihan, pendekatan koperasi swadaya dan pendekatan pembangunan terpadu.

1. Pendekatan Penyuluhan

a) Model konvensional

Dengan beberapa modifikasi pada tiap Negara, model ini mempunyai tujuan untuk mengikhtiarkan memperbaiki kesejahteraan keluarga penduduk pedesaan dengan memberi pendidikan kesejahteraan rumah tangga terhadap kaum perempuan.

Metodenya adalah kombinasi dari ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu dakwah dan ilmu perniagaan. Sedangkan dalam penyuluhan ada 5 tahap yaitu memupuk kesadaran (radio dianggap media yang tepat untuk tujuan ini), membangkitkan minat (motivasi) melalui rapat setempat, poster, pameran dan sebagainya, informasi dan persuasi, termasuk kunjungan kelompok binaan ke kebun peragaan.

2. Pendekatan pelatihan

Ada empat cirikhas isi program pelatihan ini yang *pertama* sedapat mungkin diusahakan menyesuaikan bahan pelatihan dengan pola budidaya dan

⁷ Wiwik Ambarsari, file:///C:/Users/Ara/Downloads/wiwik_fp_9.pdf “ Pemberdayaan Perempuan”(Minggu, 15 Januari 2016, 20.11)

keadaan lingkungan. *Kedua* seluruh latihan (kursus) diselenggarakan menurut siklus sepenuhnya untuk budidaya bersangkutan dan setiap bagian pelatihan disesuaikan dengan tahap tertentu dalam siklus budidaya tersebut. *Ketiga* bagian terbanyak dari masa pelajaran disediakan untuk kerja praktik. *Keempat* pelajaran di ruang kelas lebih difokuskan pada diskusi dalam kelompok kecil daripada menggunakan metode ceramah. Disamping itu juga diselenggarakan kursus singkat atas dasar bahan pengajaran khusus.

Pelatihan lebih banyak bersifat praktik daripada teori dan jarang sekali diadakan ceramah. Para pelatih lebih banyak mengandalkan peragaan dan para peserta ditugaskan meniru dan menerapkan unjuk kerja (performance) yang dilakukan instruktur. Para instruktur sebanyak mungkin menggunakan alat-alat yang tersedia di daerah yang bersangkutan, agar para peserta dapat melanjutkan pendidikannya sehabis masa pelatihan.

3. Pendekatan Swadaya Kooperatif

Pendekatan ini menjelaskan bahwa sekalipun program-program yang menjunjung pendekatan swadaya ini bersumber pada filsafat pembangunan atau pengembangan masyarakat yang sama, tetapi dalam beberapa segi mereka saling berbeda. *Pertama* Model Community Development adalah pengembangan atau pembangunan, tujuannya membangkitkan semangat serta hasrat pembangunan di kalangan penduduk pedesaan dan untuk mencetuskan daya kerja agar dapat membantu mencapai tujuan dan kebijakan nasional dengan dibantu oleh jawatan teknik yang berwenang. *Kedua* Model Gerakan Pembangunan Pedesaan adalah

gerakan ini mencerminkan suatu pola baru dalam usaha mengantar kaum tradisional kedalam dunia modern khususnya melalui usaha pendidikan. *Ketiga* Sistem Pendidikan Koperasi adalah sistem pendidikan ini telah didirikan dan mempunyai kegiatan yang disetujui pemerintah pusat tetapi bukan merupakan bagian dari sistem pendidikan formal. Model ini telah mengadakan kegiatan untuk memperkuat gerakan koperasi di setiap tingkat, sistem ini dipandang sebagai suatu lembaga ekonomi dan sosial yang utama untuk merombak masyarakat agraris menuju sistem sosialisme.

4. Pendekatan Pembangunan Terpadu

Pendekatan ini pada lembaga-lembaga taraf internasional, bilateral dan nasional terjadilah semacam consensus yang lebih menyukai pendekatan yang komprehensif dan lebih terpadu menuju ke arah pengembangan.